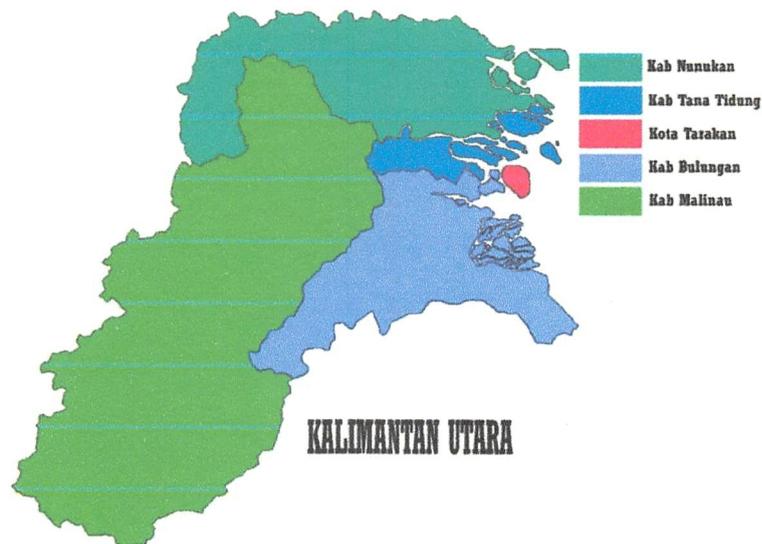




# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017**

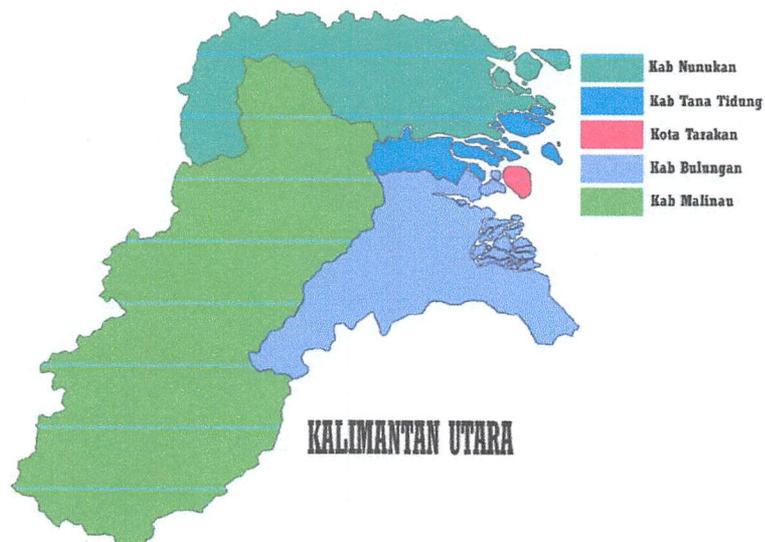


## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
Jl. Bhayangkara Gang. III Telp. 0552-2026608, Faks. 0552-2026052  
TANJUNG SELOR - KALIMANTAN UTARA



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Jl. Bhayangkara Gang. III Telp. 0552-2026608, Faks. 0552-2026052  
TANJUNG SELOR - KALIMANTAN UTARA



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang ideologi kebangsaan, kewaspadaan nasional dan politik dalam negeri yang berada diwilayahnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah maka Provinsi Kalimantan Utara telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun 2017, walaupun kami akui masih adanya kekurangan dalam penyusunan laporan ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan dan saran sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

Laporan ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



Berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (Lima) sasaran yang akan direalisasikan pada Tahun 2017 melalui 8 (Delapan) program yang diimplementasikan dalam 28 (Dua puluh delapan) kegiatan, secara keseluruhan disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai dari 28 (Dua puluh delapan) kegiatan dengan capaian sebesar **98,67 %**. capaian kinerja tersebut pada rentang antara 85 – 100 % dengan interpretasi “**AA**”

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2017 ini dibuat, semoga dapat menjadi gambaran kinerja yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini dapat dijadikan media pengelolaan kinerja ke arah perbaikan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Tanjung Selor, 27 Maret 2018

Ketua,



**Drs. BASIRAN**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19691228 199101 1 001



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
A. Tugas Pokok .....	1
B. Fungsi/Kedudukan .....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Susunan Organisasi.....	3
E. Sumber Daya Manusia Aparatur .....	3
F. Sarana dan Prasarana.....	4
G. Sumber Dana .....	7
H. Isu Strategis/Permasalahan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tujuan Strategis .....	13
2.3. Sasaran Organisasi.....	14
2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	16
2.5. Perjanjian Kinerja .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
3.2. Analisa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	27
3.3. Realisasi Anggaran .....	28
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>30</b>

### LAMPIRAN:

1. Tabel Rencana Kerja Tahun 2017 (Form RKT)
2. Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2017 (Form PK)
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 (Form PKK)



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Kalimantan Utara dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **A. Tugas Pokok**

Menurut pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

##### **B. Fungsi/Kedudukan**

Dalam pasal 18 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 10 Tahun 2014 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

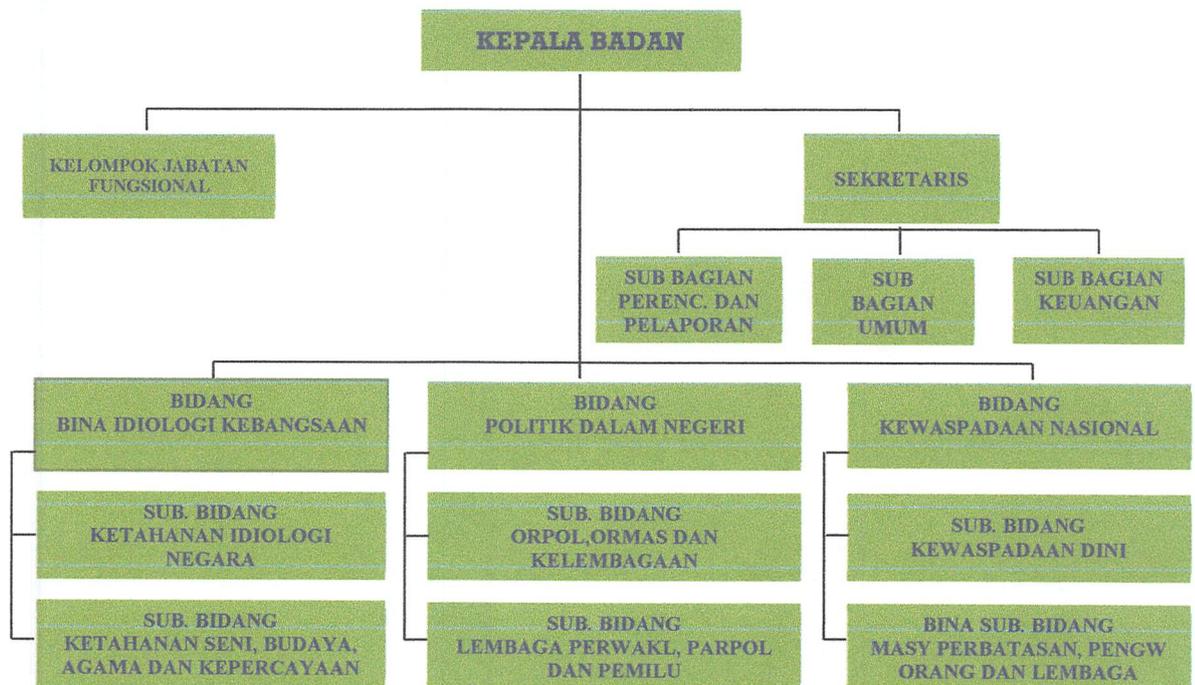


- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan Ideologi Kebangsaan.
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Politik dalam Negeri.
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
- 6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- 7) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. Struktur Organisasi

Tabel 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROV. KALIMANTAN UTARA  
(Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)**





#### D. Susunan Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 10 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
  - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - b) Kepala Sub Bagian Umum
  - c) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
  - a) Sub Bidang Ketahanan Idiologi Negara
  - b) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
- 4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
  - a) Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
  - b) Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu
- 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
  - a) Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
  - b) Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

#### E. Sumber Daya Manusia Aparatur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2017 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak **24 (Dua puluh empat)** orang yang terdiri dari pendidikan Paska Sarjana (S2) sebanyak **3 (Tiga)** orang, Sarjana (S1) sebanyak **13 (Tiga belas)** orang, D.3 sebanyak **2 (Dua)** Orang



dan SLTA sebanyak 7 (Tujuh) orang, jumlah tersebut sangat belum mencukupi kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang ada.

Tabel 1.2

**Kondisi Sumber Daya Aparatur  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara  
Menurut Kualifikasi Pendidikan**

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN			
	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	
1.	SLTA	PNS	6	SLTA	PNS	12	
2.	D III	PNS	2	D III	PNS	8	
3.	S1	PNS	15	S1	PNS	22	
4.	S2	PNS	1	S2	PNS	4	
JUMLAH			24	JUMLAH			46

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2017

## F. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Sewa kantor yang terletak yang terletak di Jalan Bhayangkara Rt. 41 Nomor 53 Tanjung Selor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3

**Daftar Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017**

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN
1	2	3	4
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan 2013
5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan 2013



6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014
33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014
35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014
36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014



37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan	2015
45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scanner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	2	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Kayu/Esl IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Esl IV	7	Pengadaan	2016
65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016
67.	Speaker	1	Pengadaan	2016



68.	Printer Portable	1	Pengadaan	2016
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inchi	1 Unit	Pengadaan	2017

#### G. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 11.604.563.826,-** (*Sebelas milyar enam ratus empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.079.871.826,-** (*Empat milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) dan belanja langsung sebesar **Rp. 7.524.692.000,-** (*Tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

#### H. Isu Strategis/Permasalahan

Dalam menyusun rencana strategis untuk kurun 5 tahun mendatang telah ditetapkan 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:



1. Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.

Permasalahan yang saat ini berkembang sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Menurunnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat..
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil (Outcome) yang dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2017 – 2021 dengan perhitungan kekuatan, peluang, kelemahan dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang menyangkut visi, misi, tujuan dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab ini, Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2017 akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja ( *Performance Plan* ) 2016.

#### 2.1. VISI DAN MISI

##### a. Visi

Visi ***“Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”***.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan



tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

#### **b. Misi**

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah "***Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa***" yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.



Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analisis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

*Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.*

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman



diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi kedua adalah:

- a) Faktor pendorong adalah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
  - b) Faktor penghambat:
    1. Masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
    2. Masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
- 2) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.



Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan pelayanan kependudukan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi ketiga adalah:

- a) Faktor pendorong adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur.
- b) Faktor penghambat adalah strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan.

## 2.2. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2017 – 2021 sebanyak 6 (Enam) tujuan sebagai berikut :



Tabel 2.1

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Mewujudkan Kalimantan Utara yang Aman dan Damai	1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dimasyarakat
		2	Menciptakan rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan
		3	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik dimasyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
2	Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa	4	Terlaksananya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik
		5	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas kedinasan
		6	Terwujudnya aparatur yang taat peraturan perundang-undangan

### 2.3. SASARAN ORGANISASI

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.



Karakteristik dari indikator paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan, dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Kesatuan dan Bangsa Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2

No.	TUJUAN		SASARAN
1	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dimasyarakat	1	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat
2	Menciptakan rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	2	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan
3	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik dimasyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara	3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis



4	Terlaksananya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	4	Terwujudnya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik
5	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung tugas kedinasan	5	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan
6	Terwujudnya aparatur yang taat peraturan perundang-undangan	6	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing – masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran		Indikator	
1		2	
1.	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	1.	Kondisi rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat
2.	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	2.	Terhindarnya konflik antar suku, umat beragama, ras dan golongan
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	3.	Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui bidang politik
4.	Terwujudnya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	4.	Adanya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik
5.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	5.	Pelayanan publik urusan kesbangpol dapat dilaksanakan lebih optimal
6.	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	6.	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan



## 2.4. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menetapkan kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut:

### a. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2017 menetapkan 1 (Satu) kebijakan dengan uraian, sebagai berikut:

Tabel 2.4

KEBIJAKAN	
1.	Mengadakan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berpolitik serta membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

### b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 menetapkan 8 (Delapan) program utama dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sasaran 1		Program 2	
1.	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	1.	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
		2.	Pengembangan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang sehat dan demokratis	3.	Pendidikan politik masyarakat
3.	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	4.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		5.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.	Terwujudnya transparansi pelayanan administrasi dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	6.	Pelayanan administrasi perkantoran
5.	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	7.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	8.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

### c. Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan – kegiatan yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2017 sebanyak 28 ( Dua puluh ) butir meliputi:

Tabel 2.6

#### KEGIATAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2017

KEGIATAN	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor



5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan makanan dan minuman
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di daerah
14	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16	Pendidikan dan pelatihan formal
17	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
18	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
19	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
20	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan
21	Monitoring evaluasi dan pelaporan
22	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
23	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
24	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam peningkatan wawasan kebangsaan
25	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
26	Penyuluhan kepada masyarakat
27	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
28	Monitoring evaluasi dan pelaporan

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja (Performance Plan) 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat



sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja untuk masing – masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Terwujudnya responabilitas pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	1	Persentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan	95%
2.	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	2	Persentase tingkat pelanggaran yang terjadi	20%
3.	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	3	Indeks kepuasan masyarakat	95%
4.	Terwujudnya kewaspadaan dan hubungan yang bersinergi antar lembaga	4	Persentase kerjasama dengan aparat pencegah kejahatan	90%
5.	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat dan demokratis di masyarakat	5	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik	80%

Indikator Kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:

- Masukan ( **Inputs** ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, misalnya sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- Keluaran ( **Outputs** ) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan ;
- Hasil ( **Outcome** ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. **Outcomes**



merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ;

- d. Manfaat ( **Benefit** ) adalah kegunaan suatu keluaran ( **outputs** ) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik ;
- e. Dampak ( **Impact** ) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Oleh karena itu untuk kegiatan Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara baru menerapkan indikator kinerja kegiatan berupa input, Output, dan Outcome sedangkan Benefit dan Impact belum diterapkan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data untuk indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2017 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Capaian kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan (proyek) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran berupa, *Input, Output dan Outcome*. Adapun pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik dari internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sistem informasi yang ada maupun dari Eksternal Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada **Fomulir PKK**.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Renstra telah menetapkan sasaran strategis untuk Tahun 2017 sebanyak 8 (Delapan) yang akan direalisasikan dalam 8 (Delapan) Kebijakan dan 28 (Dua puluh delapan) kegiatan dengan dijabarkan didalam sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**a. Analisa Perbandingan Target dan Capaian Kinerja**

Tabel 3.1

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017  
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN KINERJA**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tanggungjawab pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	1 Persentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan	95%	95%	100
2	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	2 Persentase tingkat pelanggaran yang terjadi	20%	25%	80,00
3	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	3 Indeks kepuasan masyarakat	95%	90%	94,73
4	Terwujudnya kewaspadaan dan hubungan yang bersinergi antar lembaga	4 Persentase kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan	90%	85%	94,44
5	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat dan demokratis di masyarakat	5 Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik	80%	73%	97,33

- **Sasaran Ke-1** dengan indikator persentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan capaian indikator sebesar 100,00 %.
- **Sasaran Ke-2** dengan indikator persentase tingkat pelanggaran yang terjadi, dengan capaian indikator sebesar 80,00 %.
- **Sasaran Ke-3** dengan indikator indeks kepuasan masyarakat dengan capaian indikator sebesar 94,73 %.



- **Sasaran Ke-4** dengan indikator persentase kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan dengan capaian indikator sebesar 94,44 %.
- **Sasaran Ke-5** dengan indikator persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik dengan capaian indikator sebesar 97,33 %.

#### b. Analisa Penganggaran dikaitkan dengan Capaian Sasaran

Tabel 3.2

#### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGANGGARAN DIKAITKAN DENGAN CAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya tanggung jawab pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	Persentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Pelayanan administrasi perkantoran	2.834.197.000	95%	2.652.471.816	95%
2	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat pelanggaran yang terjadi	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	425.770.000	20%	404.965.111	25%
3	Meningkatnya persatuan dan kesatuan sehinggaterwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.142.150.000	95%	946.511.433	90%
			Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	487.900.000	-	357.461.383	-
			Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	537.300.000	-	486.277.861	-
4	Terwujudnya kewaspadaan dan hubungan yang bersinergi antar lembaga	Persentase kerjasama dengan aparat pencegah kejahatan	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	424.375.000	90%	339.509.056	85%
5	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat dan demokratis di	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang	Pendidikan politik masyarakat	1.673.000.000	75%	1.608.206.490	73%



	masyarakat	organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik					
				7.524.692.000		6.795.403.150	

- **Sasaran Ke-1** mempunyai 15 (Lima belas) indikator sasaran, dengan capaian 15 indikator sasaran dengan capaian 100,00 %.
- **Sasaran Ke-2** mempunyai 2 (Dua) indikator sasaran, dengan nilai capaian nilai 100,00 %.
- **Sasaran Ke-3** mempunyai 6 (Enam) indikator sasaran, dengan 4 (Empat) indikator sasaran capaian 100,00%, 1 (Satu) indikator dengan nilai capaian 84,72 %, 1 (Satu) indikator sasaran dengan nilai capaian 95,00%, kedua indikator sasaran tersebut sudah dilaksanakan namun masih belum optimal.
- **Sasaran Ke-4** mempunyai 2 (Dua) indikator sasaran, dengan 1(Satu) indikator dengan capaian 100,00%, dan 1 (Satu) indikator dengan capaian 86,87%.
- **Sasaran Ke-5** mempunyai 3 (Tiga) indikator sasaran, 2 (Dua) indikator dengan capaian 100,00% dan 1 (Satu) Indikator sasaran mencapai 96,43 %.



Tabel 3.3

SASARAN		PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN ( %)							KET
No	Jumlah Indikator Sasaran	>100	100	>90- <99,99	>70- <89,99	>50- <69,99	<50	0	
1.	15	-	15	-	-	-	-	-	-
2.	2	-	2	-	-	-	-	-	-
3.	6	-	4	1	1	-	-	-	-
4.	2	-	1	-	1	-	-	-	-
5.	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	Jumlah		24	2	2	-	-	-	-

Dari data tersebut diatas disimpulkan bahwa terdapat 5 (Lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 telah dijabarkan sebanyak 28 (Dua puluh delapan) indikator sasaran dalam APBD Tahun 2017.

Dengan demikian secara umum Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dari 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai 98,67 % dengan kategori "AA".

Dengan arti nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

<i>Katategori</i>	<i>Nilai</i>
AA	85 -100
A	75 - 85
B	65 - 75
CC	50 - 65
C	30 - 50
D	00 - 30



### 3.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu antara capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2016. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2016, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara**

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017
1	2	3	4	6
1	Terwujudnya tanggung jawab pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	1 Persentase administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100	100
2	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	2 Persentase tingkat pelanggaran yang terjadi	71,43	80,00
3	Terwujudnya rasa tenang dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	3 Indeks kepuasan masyarakat	94,74	94,73
4	Terwujudnya kewaspadaan dan hubungan yang bersinergi antar lembaga	4 Persentase kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan	94,11	94,44
5	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat dan demokratis di masyarakat	5 Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan dan kesadaran berpolitik	93,33	97,33

Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 merupakan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara. Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa dari 5 (Lima) indikator kinerja pada tahun 2016 telah menunjukkan pencapaian yang maksimal. Untuk indikator kinerja yang diukur pada tahun 2016 dan 2017 terlihat bahwa pencapaian tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016. Hal ini



terlihat pada indikator kinerja persentase tingkat pelanggaran yang terjadi dimana tahun 2017 capaiannya 80%. Serta persentase kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan, dimana tahun 2017 capaiannya sebesar 94,44%. Namun secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan. Di samping itu, apabila dilakukan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 secara umum mampu mempertahankan kinerja tahun 2016, yang tergolong sangat baik.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar **Rp. 11.604.563.826,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.079.871.826,- (Empat Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)** dan belanja langsung sebesar **Rp. 7.524.692.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** sedangkan realisasinya adalah **Rp 10.026.637.750,- (Sepuluh Milyar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp 3.231.234.600,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau sebesar **79,20 %**, dan belanja langsung sebesar **Rp 6.795.403.150,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **90,31 %** jika diuraikan dalam tabel adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2017**

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.079.871.826</b>	<b>4.079.871.826</b>	<b>3.231.234.600</b>	<b>79,20</b>
	Belanja Pegawai	4.079.871.826	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20
II	<b>Belanja Langsung</b>	<b>7.524.692.000</b>	<b>7.524.692.000</b>	<b>6.795.403.150</b>	<b>90,31</b>
	- Belanja Pegawai	2.209.200.000	1.987.400.000	1.929.200.000	97,07
	- Belanja Barang dan Jasa	5.275.492.000	5.497.292.000	4.828.220.150	87,83
	- Belanja Modal	40.000.000	40.000.000	37.983.000	94,96
	<b>Jumlah</b>	<b>11.604.563.826</b>	<b>11.604.563.826</b>	<b>10.026.637.750</b>	<b>86,40</b>

**Tabel 3.6**  
**REALISASI ANGGARAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2015 - 2017**

NO	JENIS BELANJA	2015			2016			2017		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.694.558.758</b>	<b>2.472.995.747</b>	<b>52,68%</b>	<b>5.233.341.522</b>	<b>2.986.952.262</b>	<b>57,08%</b>	<b>4.079.871.826</b>	<b>3.231.234.600</b>	<b>79,20</b>
	Belanja Pegawai	4.694.558.758	2.472.995.747	52,68%	5.233.341.522	2.986.952.262	57,08%	4.079.871.826	3.231.234.600	79,20
II.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>23.515.904.050</b>	<b>10.035.722.158</b>	<b>42,68%</b>	<b>13.020.541.000</b>	<b>9.179.081.420</b>	<b>70,50%</b>	<b>7.524.692.000</b>	<b>6.795.403.150</b>	<b>90,31</b>
	- Belanja Pegawai	7.545.750.000	4.132.236.000	54,24%	4.250.480.000	3.495.580.000	82,24%	1.987.400.000	1.929.200.000	97,07
	- Belanja Barang dan Jasa	14.266.554.050	4.946.597.658	34,67%	8.650.061.000	5.581.861.420	64,53%	5.497.292.000	4.828.220.150	87,83
	- Belanja Modal	1.703.600.000	956.888.500	56,17%	105.000.000	101.640.000	84,70%	40.000.000	37.983.000	94,96
	<b>Jumlah</b>	<b>28.210.462.808</b>	<b>12.508.717.905</b>	<b>44,34%</b>	<b>18.253.882.522</b>	<b>12.166.033.682</b>	<b>66,65%</b>	<b>11.604.563.826</b>	<b>10.026.637.750</b>	<b>86,40%</b>



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2017. maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### 4.1. Permasalahan

Kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 dalam mengelola program dan kegiatan yaitu :

- 1) Banyaknya kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan 2017 sehingga banyak kegiatan yang baru bisa dilaksanakan setelah APBD Perubahan disahkan. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan capaian program/kegiatan yang telah selesai dengan rata-rata kegiatan terlaksana 100% walaupun dari segi keuangannya hingga tanggal 31 Desember 2017 mencapai sebesar 86,40%
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas dan kurang kompeten.

#### 4.2. Solusi

- 1) Diharapkan semua kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga tidak ada lagi kegiatan yang harus diselesaikan di akhir tahun anggaran. Perencanaan harus dilakukan dengan matang dan terencana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.
- 2) Mengajukan usulan untuk penambahan pegawai yang kompeten pada tahun 2018 agar dapat memaksimalkan kinerja Badan



Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun yang akan datang.

#### 4.3. Kesimpulan

Pada Tahun Anggaran 2017 walaupun program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan terbatas, namun hal ini tidak menghalangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk bekerja semaksimal mungkin apalagi. Adapun seluruh kegiatan yang diamanahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2017 telah terlaksana semua melalui APBD 2017 dengan capaian keuangan dari Belanja Tidak langsung sebesar 79,20% dan Belanja Langsung sebesar 90,31%. Secara keseluruhan realisasi terhadap APBD 2017 yakni sebesar 86,40%

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah **98,67 %** yang berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan “**AA**”.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada tahun 2017, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha maksimal agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi seperti SDM yang terbatas, molornya pengesahan APBD Perubahan 2017 pelan-pelan akan diperbaiki pada tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan pihak-pihak terkait ( Stake holder ), sehingga kedepan akan tercapai sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya berkat kerja keras serta ketekunan Tim Penyusun dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Laporan Kinerja ini dapat di susun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.



**TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2017**

<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>:</b>	<b>Drs. BASIRAN</b>
<b>KETUA</b>	<b>:</b>	<b>TAPIP PURNOMO, S.H.</b>
<b>SEKRETARIS</b>	<b>:</b>	<b>KASIYONO</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>:</b>	<b>1. HENDRA SAPUTRA, S.E.</b> <b>2. AYOP CAHYONO, S.E.</b> <b>3. SADRIANSYAH, S.IP.</b> <b>4. JAMALUDDIN, S.E., M.Pd.</b> <b>5. ZAINUDDIN, S.Pd.</b> <b>6. ROHANI</b>
<b>SEKRETARIAT</b>	<b>:</b>	<b>1. EDWIN FITRIO, S.Kom.</b> <b>2. SUPRI HARTINI</b> <b>3. ABIGAIL TULAK, S.E.</b> <b>4. AHMAD IQBAL, S.IP.</b> <b>5. SARIFUDDIN, S.IP.</b> <b>6. RANOESTY LILING, M.H.</b> <b>7. FAJAR, S.Sos.</b>



LAMPIRAN:

1. Tabel Rencana Kerja Tahun 2017 (Form RKT)
2. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Form PK)
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 (Form PKK)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya transparansi pelayanan adm perkantoran dalam lingkup badan kesatuan bangsa dan politik	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	100
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	80
3	Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	60
4	Terwujudnya rasa tenang dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	85
5	Terwujudnya rasa toleransi antar suku, umat beragama, ras dan golongan	Persentase masyarakat kaltara yang berwawasan kebangsaan	%	75
6	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	%	73

Tanjung Selor, 27 Maret 2018  
Kepala Badan,  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Drs. ESTRIAN  
NIP. 1069 226 199101 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya responsilitas pelayanan publik dalam urusan kesatuan bangsa dan politik	Persentase administrasi yang dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan	95%
2	Meningkatnya kesadaran terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan penundangan yang terjadi	20%
3	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman dilingkungan masyarakat	Indek kepuasan masyarakat atas kondisi ketentraman, keamanan dan kenyamanan	95%
4	Terwujudnya kewaspadaan dan hubungan yang bersinergi antar lembaga	Persentase kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan	90%
5	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang sehat dan demokratis dimasyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan peran aktif dalam kehidupan berpolitik	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelayanan administrasi perkantoran	2.267.997.000	APBD Prov.
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	418.000.000	APBD Prov.
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	392.020.000	APBD Prov.
4	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.147.650.000	APBD Prov.
5	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	424.375.000	APBD Prov.
6	Pengembangan wawasan kebangsaan	678.250.000	APBD Prov.
7	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	523.400.000	APBD Prov.
8	Pendidikan politik masyarakat	1.673.000.000	APBD Prov.
<b>Jumlah</b>		<b>7.524.692.000</b>	



Gubernur Kalimantan Utara,

*[Signature]*  
DR. H. IRIANTO LAMBRIE



Tanjung Selor, 17 Januari 2017  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

*[Signature]*  
Drs. BASIRAN

NIP. 196911281991011001

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Form PKK

Program	Kegiatan					% Pencapaian	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	<b>Input :</b> Dana SDM  <b>Output :</b> Jumlah surat menyurat yang dikirim  <b>Outcome :</b> Tercapainya pelayanan surat menyurat	Rp Orang  Surat  Unit kerja	7.000.000 24  600  1	6.102.450 24  600  1	87,18 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input :</b> Dana SDM  <b>Output :</b> Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  <b>Outcome :</b> Terwujudnya pelayanan komunikasi dan tukar informasi	Rp Orang  Bulan  Unit kerja	50.440.000 24  12  1	40.022.711 24  12  1	79,35 100  100  100	
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan  <b>Outcome:</b> Terselenggaranya pengadministrasian keuangan	Rp Orang  Bulan  Unit kerja	883.000.000 24  12  1	874.000.000 24  12  1	98,98 100  100  100	
	4 Penyediaan jasa kebersihan	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor  <b>Outcome:</b> Terwujudnya kebersihan kantor	Rp Orang  Bulan  Unit kerja	5.000.000 24  12  1	4.655.200 24  12  1	93,10 100  100  100	
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki  <b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	Rp Orang  Unit  Unit kerja	5.000.000 24  25  1	4.130.000 24  25  1	82,60 100  100  100	
	6 Penyediaan alat tulis kantor	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan  <b>Outcome:</b> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp Orang  Bulan  Unit Kerja	84.017.000 24  12  1	50.768.850 24  12  1	60,43 100  100  100	

1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan <b>Outcome:</b> Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Rp Orang  Bulan  Unit Kerja	61.000.000 24  12  1	54.315.600 24  12  1	89,04 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	8 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan gedung/kantor	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan <b>Outcome:</b> Tersedianya fasilitas dan komponen alat listrik	Rp Orang  Unit  Unit Kerja	10.000.000 24  1  1	9.346.700 24  1  1	93,47 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	9 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor <b>Outcome:</b> Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	Rp Orang  Unit  Unit Kerja	45.000.000 24  5  1	40.523.000 24  5  1	90,05 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan <b>Outcome:</b> Bertambahnya wawasan dan pengetahuan bagi aparatur	Rp Orang  Exempliar  Unit Kerja	27.000.000 24  2.160  1	23.335.000 24  2.160  1	86,43 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	11 Penyediaan makan minum kantor	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah makan/minum yang disediakan <b>Outcome:</b> Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur	Rp Orang  Porsi  Unit Kerja	91.500.000 24  4.000  1	76.575.000 24  4.000  1	83,69 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah <b>Outcome:</b> Tercapainya kesepakatan dan kesepakatan antar dinas instansi pusat dan daerah	Rp Orang  Kali  Unit Kerja	737.240.000 24  60  1	734.789.543 24  60  1	99,67 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	13 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah <b>Outcome:</b> Tercapainya kesepakatan dan kesepakatan antar dinas instansi pusat dan daerah	Rp Orang  Kali  Unit Kerja	490.000.000 24  90  1	486.727.674 24  90  1	99,33 100  100  100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8
2 Peningkatan sarana dan prasarana aparat	1 Penyewaan gedung/gudang/kantor	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkran kantor dinas yang disewa  <b>Outcome:</b> Tersedianya sarana gedung/kantor	Rp Orang  Unit  Unit Kerja	120.000.000 24  1  1	101.640.000 24  1  1	84,70 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Pelaksanaan tugas kedinasan tidak mengalami kendala	Rp Orang  Unit  Unit kerja	218.000.000 24  33  1	145.539.968 24  33  1	66,76 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparat	1 Pendidikan pelatihan formal	<b>Input :</b> Dana SDM  <b>Output :</b> Jumlah peserta diklat formal <b>Outcome :</b> meningkatkan kualitas sdm aparat	Rp Orang  Orang  Unit kerja	240.000.000 24  27  1	222.731.261 24  27  1	92,80 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	<b>Input :</b> Dana SDM  <b>Output :</b> Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan  <b>Outcome :</b> Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan	Rp Orang  Kali  Orang	185.770.000 24  1  500	182.233.850 24  1  500	98,10 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
4 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan  <b>Outcome:</b> Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan	Rp Orang  Kegiatan  Orang	648.600.000 24  1  100	556.518.310 24  1  100	85,80 100  100  100	APBD PROV. KALTARA
	2 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan  <b>Outcome:</b> Tercapainya kesepakatan dan pemahaman masyarakat dan aparat	Rp Orang  Kegiatan  Laporan	493.550.000 24  1  1	389.993.123 24  1  1	79,02 100  84,72  100	APBD PROV. KALTARA
5 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan	<b>Input:</b> Dana SDM  <b>Output:</b> Jumlah kerjasama dengan aparat dalam pencegahan kejahatan  <b>Outcome:</b> Terjalannya kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	Rp Orang  Kegiatan  Paket	334.375.000 24  1  1	284.658.056 24  1  1	85,13 100  100  100	APBD PROV. KALTARA

1	2	3	4	5	6	7	8	
6	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah laporan atas kegiatan ekososbud <b>Outcome:</b> Tersedianya laporan atas kegiatan ekososbud	Rp Orang  Laporan Laporan	90.000.000 24  2 2	54.851.000 24  2 2	60,95 100  86,67 100	APBD PROV. KALTARA
	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah rapat pengurus dan anggota FKUB dengan tokoh agama dan masyarakat <b>Outcome:</b> Terciptanya toleransi dalam kehidupan beragama	Rp Orang  Kegiatan Paket	250.250.000 24  1 1	209.423.283 24  1 1	83,69 100  100 100	APBD PROV. KALTARA
	2	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Cerdas cermat pancasila, Harkitnas dan Hapsak Pancasila <b>Outcome:</b> Terciptanya rasa solidaritas dikalangan masyarakat	Rp Orang  Kegiatan Paket	237.650.000 24  3 1	148.038.100 24  3 1	62,29 100  95,00 100	APBD PROV. KALTARA
7	1	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan (FPIK) <b>Outcome:</b> Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pembentukan forum pembauran kebangsaan	Rp Orang  Kali Laporan	295.900.000 24  1 1	273.750.874 24  1 1	92,51 100  100 100	APBD PROV. KALTARA
	2	Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah seminar dan diskusi wawasan kebangsaan <b>Outcome:</b> Terlaksananya seminar, Talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	Rp Orang  Kali Laporan	241.400.000 24  1 1	212.527.077 24  1 1	88,04 100  100 100	APBD PROV. KALTARA
8	1	Pendidikan Politik Masyarakat	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah penyuluhan tentang pendidikan politik <b>Outcome:</b> Terlaksananya penyuluhan tentang politik	Rp Orang  Kali Laporan	652.600.000 24  2 2	633.685.638 24  2 2	97,10 100  100 100	APBD PROV. KALTARA
	2	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah fasilitasi perselisihan antar parpol <b>Outcome:</b> Terselesainya perselisihan parpol	Rp Orang  Kali Laporan	472.000.000 24  1 1	450.350.091 24  1 1	95,41 100  96,43 100	APBD PROV. KALTARA
	3	Monitoring Evaluasi Pelaporan	<b>Input:</b> Dana SDM <b>Output:</b> Jumlah laporan dan monitoring serta pendataan parpol dan ormas <b>Outcome:</b> Tersedianya data parpol dan ormas	Rp Orang  Laporan Laporan	548.400.000 24  1 1	524.190.761 24  1 1	95,59 100  100 100	APBD PROV. KALTARA